

Analisis Penentuan Prioritas Sektor Ekonomi Dalam Pembangunan Daerah Pada Setiap Kabupaten Penyangga Kota Mataram Sebagai Pusat Pertumbuhan di Pulau Lombok

Muhammad Alwi¹, Putu Karismawan², I Dewa Ketut Yudha S³
Universitas Mataram

Correspondence Email: muhnurrahmah303@gmail.com

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Prioritas sektor ekonomi dalam pembangunan daerah</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor ekonomi yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan daerah pada setiap Kabupaten sebagai penyangga kota mataram sebagai pusat pertumbuhan di Pulau Lombok. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PDRB dari 5 Kabupaten dan Kota di Pulau Lombok dari tahun 2017 samapai tahun 2021. Medode analisis yang digunakan adalah medode analisis SLQ, Analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP) serta analisis Overlay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang perlu dijadikan alternatif prioritas dalam pembangunan karena memiliki keunggulan dari segi kontribusi dan dari segi pertumbuhan. Untuk daerah ; Kabupaten Lombok Barat yang dapat dijadikan pilihan prioritas dalam pembangunan daerah adalah sektor : Industri Pengolahan, Pengadaan listrik dan gas, Kontruksi, Transportasi dan perdagangan, Informasi dan komunikasi, Jasa keuangan dan asuransi, Real Estate, Jasa pendidikan, Jasa Kesehatan dan kegiatan social, Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dijadikan pilihan prioritas dalam pembangunan daerahnya adalah sektor : Pertanian, kehutanan dan perikanan, Kontruksi, Real Estate, Jasa kesehatan dan kegiatan social, Jasa lainnya . Kabupaten Lombok Timur yang dapat dijadikan pilihan prioritas dalam pembangunan daerah adalah sektor: Kontruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Real estate, Jasa pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan social. Kabupaten Lombok Utara yang dapat dijadikan pilihan proritas dalam pembangunan daerah adalah sektor: Pertanian, kehutanan dan perikanan, Pengadaan listrik dan gas, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social, Jasa pendidikan. Disarankan agar pemerintah masing masing Kabupaten hendaknya memberi prioritas dalam pembangunan daerah masing-masing pada sektor yang unggul dari segi kontribusi dan dari segi pertumbuhan dalam pembentukan PDRB.</p>
<p>Keywords: Priority of the Economic Sector in Regional Development</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>The purpose of this study is to analyze the economic sectors that need to be prioritized for the purpose of regional development in each district as e buffer for the city of Mataram as growth center of Lombok Island. The data used in this study is secondary data in the form of Gross Regional Domistic Product (call PDRB) of west Nusa Tenggara Province and Gross Regional Domistic product of 5 district and city on Lombok Island from 2017 to 2021. The analytical methods used are SLQ analysis method, Growth ratio model and overlay analysis.</p> <p>The result of the study indicate that te economic sector that are used as an</p>

alternative priority in development because it has advantages in term of the magnitude of contribution are and the high growth rate for each district and city are as follows in West Lombok Regency priority sectors in regional development are the manufacturing industry sector, electricity and gas, procurement sector, transportation and warehousing construction sector, information and communication sector, financial services and real estate insurance sector, education and health service and social activities.

In central Lombok Regency, the sectors that can be prioritized for regional development are agriculture estate sector, health service sector, social activities and others can be prioritized in regional development are constructure sector whole sale and retail trade sector, car and motorcycle repair repair sector, real estate educational service, health service and social activities in North Lombok, the sector that can be prioritized in regional development are agriculture forestry and fisheries sector, electricity and gas procurement sector, transportation sector government administration sector, defense and social security sector, education services sector. It is recommended that the government of each district should give priority in developing of their respective regions to sectors that superior in term of high rate of growth information of PDRB.

1. PENDAHULUAN

Keterbelakangan ekonomi merupakan suatu alasan yang kuat dilaksanakannya pembangunan daerah yang berkelanjutan bagi kebanyakan Negara berkembang dewasa ini. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Menurut Rostow bahwa pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sering didasarkan atas penapaian target sektoral, tercapainya target tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita setiap tahun dan juga dapat berdampak kepada transisi dari sektor tradisional pertanian ke sektor industry dan jasa-jasa.

Daerah Kabupaten dan Kota adalah bagian dari suatu Negara yang terbagi atas beberapa wilayah atau Kawasan. Sebuah daerah harus membuat suatu rencana untuk kemajuan daerah tersebut untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, dimana keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan nasional. Begitu pula keberhasilan pembangunan suatu Provinsi tergantung dari keberhasilan pembangunan kabupaten dan kota yang membentuknya. Agar pembangunan berhasil yang ditandai dengan semakin meningkat produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan perkapita maka perlu pengembangan pembangunan sektor sektor ekonomi potensial, disamping pembangunan sektor lainnya yang ada di Daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi suatu daerah adalah merupakan proses, di mana pemerintah dan masyarakat besama-sama mengolah sumberdaya ekonomi yang ada di daerah itu. Pengelolaan sumber-sumber ekonomi tersebut dapat dikelola secara mandiri, kelompok dan kemitraan dengan pemerintah maupun swasta, guna menciptakan lapangan kerja dan merasng pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Adanya pembangunan ekonomi ini akan menimbulkan berbagai macam perubahan diantaranya struktur ekonomi, pendapatan daerah dan masyarakat meningkat dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja. Berdasarkan catatan sejarah, tingkat pertumbuhan sektoral ini termasuk pergeseran secara perlahan dari kegiatan-kegiatan pertanian menuju kegiatan non pertanian dan akhirnya dari sector industri ke sektor jasa (Arsyad, 1995; 75).

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan secara resmi pelaksanaan otonomi daerah mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Di mana masing masing pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki hak dan kewenangan Penyelenggaraan pemerintahan yang cukup luas. Hal ini akan berimplikasi dengan

perubahan yang cukup mendasar dalam tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah, kemampuan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pembiayaan, aparatur penyelenggaraan, sarana dan prasarana, organisasi dan manajemen serta ketersediaan dokumen induk perencanaan yang strategis untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut masih sangat terbatas berdaya.

Dalam konteks pembangunan daerah, pelaksanaan harus berdasarkan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan pihak lainnya hanya bersifat sementara dan pelengkap. Oleh karena itu perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana dan atau investasi pemerintah dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah, dana investasi yang tepat akan dapat berhasil guna dan berdaya guna akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Dalam hal ini investasi sangat perlu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Jika hal ini dapat dilakukan akan mendorong peningkatan pendapatan daerah, masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Pulau Lombok terdapat Kabupten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram, sedang Pulau Sumbawa terdapat Kabuten Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Setiap Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat tentu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Untuk itu potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah harus dapat dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan daerah dan masyarakatnya, maka setiap daerah/wilayah harus memilih sektor potensial untuk menjadikan prioritas dalam pembangunan daerah. Menurut Martono (2008) dengan mengetahui potensi suatu daerah , maka kesempatan daerah untuk bersaing akan lebih tinggi dibandingkan yang

tidak mengetahui potensi daerahnya. Oleh karena itu sangat penting mengetahui potensi masing daerah untuk menentukan prioritas sektor ekonomi dalam pembangunan daerah karena adanya keterbatasan anggaran. Adanya dan perkembangan dan pertumbuhan masing Kabupaten yang ada dipulau Lombok sebagai penyangga Kota Mataram akan sangat mempengaruhi perkembangan kota Mataram sebagai pusat pendidikan, perdagangan, pemerintahan dan pusat jasa-jasa sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perumusan Masalah

Sektor ekonomi manakah yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan daerah pada setiap Kabupaten di Pulau Lombok sebagai penjangga Kota Mataram sebagai pusat Pertumbuhan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis sektor ekonomi yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan daerah pada setiap Kabupaten di Pulau Lombok sebagai menjangga Kota Mataram sebagai pusat pertumbuhan di Pulau Lombok.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pusat Pertumbuhan

Setiap wilayah atau daerah baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat regional dipastikan memiliki pusat pertumbuhan, misalnya pusat pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram. Keberdayaan pusat pertumbuhan dapat menjadi daya tarik bagi wilayah sekitarnya dalam pembangunan. Pusat pertumbuhan memilik empat karestik utama sebagai pusat pertumbuhan, yaitu (!) adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu; (2) konsentrasi kegiatan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian; (3) terdapat kaitan input dan output yang kuat antara sesama kegiatan pada pusat tertentu; (4) dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut dapat sebuah industry induk yang

mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut (Syafrizal.2012.). Secara fungsional pusat pertumbuhan merupakan lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industry yang sifatnya saling berhubungan yang memiliki unsur kedinamisan sehingga mampu mendorong kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar.

Potensi Ekonomi Daerah

Potensi Ekonomi Daerah adalah kemampuan ekonomi yang terdapat di daerah mampu untuk dikembangkan dan terus dikembangkan agar menjadi sumber pendapatan daerah tersebut serta menjadi sumber penghidupan perekonomian masyarakat setempat. Dengan mengembangkan potensi yang ada bahkan dapat mendorong pembangunan perekonomian daerah (Suparmoko, 2002)

Sektor potensial yang dimiliki oleh suatu wilayah merupakan sektor basis yang dapat dikembangkan atau dimaksimalkan untuk menjadi penentu perkembangan ekonomi suatu wilayah. Pada dasarnya sektor potensial suatu daerah dapat memberikan kontribusi yang besar pada daerah, bukan hanya untuk daerah itu sendiri tetapi juga memenuhi kebutuhan daerah lain. Semua kegiatan lain bukan kegiatan basis termasuk kegiatan/sektor service atau pelayanan, tetapi untuk tidak menciptakan pengertian yang keliru tentang arti service maka disebut juga sektor non basis atau bukan sektor unggulan (Tarigan, 2012). Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outnya sebagai input dalam proses produksi (Widodo, 2006)

Pengertian Pembangunan Daerah

Pengertian Pembangunan Daerah - Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan bersama sama

mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif.

Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:

1. Meliputi seluruh aspek kehidupan
2. Dilaksanakan secara terpadu
3. Meningkatkan swadaya masyarakat

Teori Ekonomi Basis

Menurut (Lincoln, 1999) teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industry-indutri yang menggunakan sumber lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan lapangan kerja (*job creation*).

Analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP)

Analisa MRP sebagai salah alat analisis alternatif yang digunakan dalam menentukan deskripsi kegiatan ekonomi perencanaan wilayah dan kota yang diperoleh dari modifikasi model shift share (Yusuf, 1998). MRP merupakan perbandingan pertumbuhan suatu kegiatan dalam skala kecil terhadap skala yang lebih luas.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang guna membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki, (Nazir, 2011: 54).

Lokasi penelitian dilakukan pada 4 Kabupaten dan Kota di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini karena setiap Kabupaten yang ada Pulau Lombok mempunyai potensi ekonomi dan dengan sendirinya prioritas pembangunan daerah juga akan berbeda sebagai penyangga kota Mataram sebagai pusat pertumbuhan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data PDRB Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara, dan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk menganalisis sector ekonomi unggul sebagai prioritas dalam pembangunan daerah setiap kabupaten di pulau Lombok digunakan alat analisis Static Location Quotient (SLQ) dan Model Ratio Pertumbuhan (MRP)

Analisis SLQ (*Static Location Quotient*)

Adapun rumusan yang dipakai dalam analisis *Static location quotient*:

$$\text{Formulasi } LQ_i = \frac{\frac{v_{ij}}{v_i}}{\frac{v_{in}}{v_n}}$$

Dimana :

LQ = *Location Quotient* sector ekonomi ke i pada di Kabupaten J

v_{ij} = PDRB Sektor ekonomi i pada Kabupaten ke j

v_i = PDRB Kabupaten J

v_{in} = PDRB sektor ekonomi ke i Provinsi Nusa Tenggara Barat

v_n = PDRB Nusa Tenggara Barat

Dengan menggunakan kriteria pengukuran yang dikemukakan oleh Lincoln, 1999, maka setelah dihitung nilai LQ tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- Jika $LQ > 1$ menunjukkan sub sektor ekonomi ke-i pada Kabupaten I tergolong sektor basis atau lebih spesialis dari pada sektor yang sama di pada tingkat Provinsi.
- Jika $LQ < 1$ menunjukkan sektor ekonomi ke-i pada Kabupaten Lombok ke I tergolong sektor non basis, atau sektor i kurang spesialis dari pada sektor yang sama pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Jika $LQ = 1$ menunjukkan keswasembadaan (*self-sufficiency*) sub sektor ekonomi i, di Kabupaten i memiliki spesialis yang sama dengan sektor yang sama pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi, terutama struktur ekonomi baik pada Kecamatan maupun pada Kabupaten/Kota yang lebih menekankan pada kriteria pertumbuhan. MRP merupakan perbandingan pertumbuhan suatu kegiatan dalam skala kecil terhadap skala yang lebih luas. Terdapat dua macam rasio pertumbuhan dalam analisis tersebut yaitu:

- Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs)
- Ratio Pertumbuhan wilayah referensi (RPr)

Adapun rumus untuk kedua macam rasio diatas RPs dan RPr adalah sebagai berikut:

- Ratio pertumbuhan wilayah studi (RPs) adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan i diwilaya studi dengan laju pertumbuhan kegiatan I di wilayah refrensi dengan rumus sebagai berikut :

$$RPs = \frac{\Delta E_{ij}/E_{ij}(t)}{\Delta E_{iR}/E_{iR}(t)}$$

Keterangan :

ΔE_{ij} adalah perubahan pendapatan kegiatan I wilaya studi

$E_{ij}(t)$ adalah pendapatan kegiatan I pada awal priode penelitian

ΔE_{iR} adalah perubahan pendapatan kegiatan I di wilayah referensi

$AE_{iR}(t)$ adalah pendapatan kegiatan I awal periode penelitian di wilayah referensi.

Jika nilai $RPs > 1$ positif (+) artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor i pada tingkat wilayah studi lebih tinggi di bandingkan dengan sektor I di wilayah referensi. Jika nilai $RPs < 1$ negatif (-) artinya menunjukkan pertumbuhan suatu sektor pada tingkat wilayah studi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sektor I pada wilayah referensi.

- b. Ratio pertumbuhan wilayah referensi (RPr) adalah perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan kegiatan I di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan i wilayah referensi dengan formula sebagai berikut :

$$RPR = \frac{\Delta E_{iR}/E_{iR}(t)}{\Delta E_R/E_R(t)}$$

Keterangan

ΔE_{iR} adalah perubahan pendapatan kegiatan I di wilayah referensi.

$E_{iR}(t)$ adalah pendapatan kegiatan I awal periode di wilayah referensi

ΔE_R adalah perubahan pendapatan di wilayah referensi

$E_R(t)$ adalah pendapatan (PDRB) awal penelitian di wilayah referensi

Jika nilai $RPr > 1$ positif (+) menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sector tertentu dalam suatu sector dalam wilayah referensi lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB pada wilayah referensi. Jika $RPr < 1$ negatif (-) menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sector tertentu dalam wilayah referensi lebih kecil dari pertumbuhan PDRB wilayah referensi.

Analisis Overlay.

Analisis overlay dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kontribusi (Yusuf Maulana, 1999). Analisis overlay bertujuan untuk mengetahui deskripsi kegairahan ekonomi yang memiliki potensi dengan rasio pertumbuhan dan

keunggulan komparatif (Suyana Utama, 2010) overlay memiliki empat prediksi yaitu:

- $RPs (+)$ dan $LQ (> 1)$ membuktikan gairah sector sangat menonjol baik dari rasio pertumbuhan maupun keunggulan komparatif
- $RPs (+)$ dan $LQ (< 1)$ membuktikan gairah sector yang memiliki pertumbuhan menonjol namun tidak mempunyai keunggulan komparatif.
- $RPs (-)$ dan $LQ (> 1)$ membuktikan gairah sector yang memiliki pertumbuhan kecil namun mempunyai keunggulan komparatif.
- $RPs (-)$ dan $LQ (< 1)$ membuktikan gairah sector tidak potensial dari kedua analisis tersebut

Untuk menjawab tujuan kedua penelitian ini digunakan analisis kualitatif, dimana analisis kualitatif itu mengacu pada hasil analisis Location Quotion (LQ), analisis Dinamic Location Quotion (DLQ) dan Model Ratio Pertumbuhan (MRP)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Mataram Sebagai Pusat Pertumbuhan

Kota Mataram, sebagai pusat pertumbuhan di Pulau Lombok disangga oleh empat Kabupaten di Pulau Lombok seperti Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara tentu juga kabupaten lainnya di Provinsi NTB. Secara teoritis, keterkaitan antar wilayah mencerminkan adanya hubungan fungsional antara daerah pusat (nodal) dengan daerah penyangga (periferi), di mana daerah penyangga umumnya adalah daerah penghasil bahan mentah atau setengah jadi yang didistribusikan ke daerah pusat; sedangkan pusat mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, yang kemudian didistribusikan ke daerah penyangga. Pertumbuhan di pusat akan diikuti pertumbuhan di daerah penyangga.

Kemampuan daerah penyangga dalam meningkatkan daya saing dan penguatan keterkaitan antar wilayah menjadi penentu keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Salah satu wujud daya saing daerah adalah keunggulan satu atau beberapa sektor

/sub sektor unggulan yang merupakan sektor basis di daerah itu. Sektor basis merupakan indikator sektor /sub sektor yang menjadi spesialisasi di suatu daerah untuk menghindari inefisiensi dalam penggunaan sumberdaya daerah.

Sektor Ekonomi yang unggul atau sektor basis pada setiap Kabupaten di Pulau Lombok.

Di Pulau Lombok secara administrative terdiri atas 5 Kabupaten dan Kota dan tentu memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus dapat diketahui agar

dapat memberikan prioritas dalam pembangunan daerah masing masing dengan tujuan agar dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok.

Untuk dapat mengetahui sektor ekonomi yang unggul atau sektor Basis digunakan analisis Location Quotion Statis

Adapun hasil perhitungan SLQ untuk sektor ekonomi pada ke empat Kabupaten di Pulau Lombok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Hasil perhitungan Rata rata SLQ dari 17 sektor ekonomi tahun 2017-2021 pada ke empat Kabupaten di Pulau Lombok

No	Lapangan Usaha	Kabupaten			
		Lobak Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Lombok Utara
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,93	1,15	1,24	1,55
B	Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,26	0,36	0,22
C	Industri Pengolahan	1,10	1,22	1,81	0,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,22	0,86	0,95	1,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	1,41	1,34	0,87	1,46
F	Konstruksi	1,36	1,45	1,21	0,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1	0,84	1,10	0,90
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,58	2,25	0,64	0,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,59	0,64	0,54	3,09
J	Informasi dan Komunikasi	1,10	0,77	0,90	0,92
K	Jasa Keuangan dan asuransi	1,09	0,71	0,74	0,78
L	Real Estat	1,11	1,19	1,14	1,36
MN	Jasa Perusahaan	0,61	0,84	0,78	0,36
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	1,10	1,01	1,16	1,21
P	Jasa Pendidikan	1,12	0,99	1,15	1,25
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,01	1,26	1,11	0,88
RST U	Jasa Lainnya	1,12	1,06	0,98	1,05

Sumber data di olah dari lampiran 1.

Keterangan :

Jika $SLQ > 1$ disebut sektor Basis/ Unggulan

$SLQ < 1$ disebut sektor Non basis/ tidak unggul

Adapun Sektor basis/Unggulan pada masing-masing Kabupaten pada tabel di atas , mulai dari Kabupaten

Lombok Barat sampai dengan Kabupaten Lombok Utara terlihat pada tabel di atas.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan

Untuk mengetahui sektor ekonomi yang mempunyai pertumbuhan yang menonjol dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya di gunakan analisis Model Rasio pertumbuhan (MRP) yang menekankan pada kriteria pertumbuhan. MRP merupakan perbandingan pertumbuhan suatu kegiatan /sektor ekonomi dalam skala lebih kecil terhadap skala yang lebih luas. Dalam penelitian ini digunakan pertumbuhan sektor sektor ekonomi setiap kabupaten di Pulau

Lombok sebagai skala kecil dengan sektor sektor ekonomi pada tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai skala yang luas.

Adapun nilai MRP pada setiap Kabupaten di Pulau Lombok secara berturut sebagai berikut:

1. Model Rasio Pertumbuhan Kabupaten Lombok Barat.

Adapun hasil perhitungan MRP di Kabupaten Lombok Barat Nampak pada tabel baerikut ini:

Tabel 2. MRP Kabupaten Lombok Barat

No	Lapangan Usaha	RPR		RPS	
		Rill	Nominal	Rill	Nominal
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,23	+	1,49	+
B	Pertambangan dan Penggalian	44,35	+	1,06	+
C	Industri Pengolahan	24,76	+	1,32	+
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29,04	+	3,40	+
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	9,66	+	1,76	+
F	Konstruksi	14,75	+	0,03	+
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,06	+	1,42	+
H	Transportasi dan Pergudangan	-15,8		1,56	+
I	PenyediaanAkomodasi danMakan Minum	-21,21		-5,55	
J	Informasi dan Komunikasi	30,71	+	4,48	+
K	Jasa Keuangan dan asuransi	29,21	+	5,85	+
L	Real Estat	16,36	+	1,67	+
MN	Jasa Perusahaan,	11,06	+	-1,17	
O	Administrasi Pemerintahan, Petahanan dan Jaminan Sosial	10,97	+	0,77	-
P	Jasa Pendidikanl	18,45	+	2,23	+
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,49	+	3,73	+
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,37	+	0,44	

Sumber data di olah dari lampiran

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui:

- a. Sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR positif (+) dan nilai RPS positif (+) yaitu sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan, Industri pengolahan, Pengadaan listrik dan gas, Pengadaan air, Pengolahan sampah dan daur ulang, perdangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, Real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social, Hal ini

mengartikan bahwa pada periode tahun 2017-2021 kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten Lombok Barat.

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR negatif (-) dan nilai RPS positif (+) yaitu sektor transportasi dan pergudangan. Hal ini mengartikan bahwa pada periode tahun 2017-2021 sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat kabupaten namun tidak menonjol pada tingkat provinsi.

2. Model Ratio Pertumbuhan Kabupaten Lombok Tengah (MRP)

Adapun hasil perhitungan MRP Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Model Ratio Pertumbuhan Kabupaten Lombok Tengah Dengan Wilayah Refrensi NTB

No	Lapangan Usaha	RPR		RPS	
		Rill	Nominal	Rill	Nominal
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,23	+	4,28	+
B	Pertambangan dan Peggalian	44,35	+	4,34	+
C	Industri Pengolahan	24,76	+	0,61	
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29,04	+	4,37	+
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	9,66	+	0,44	-
F	Konstruksi	14,75	+	5,82	+
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SepedaMotor	14,06	+	6,18	+
H	Transportasi dan Pergudangan	-15,8		-32,78	
I	PenyediaanAkomodasi danMakan Minum	-21,21	-	-5,02	
J	Informasi dan Komunikasi	30,71	+	4,49	+
K	Jasa Keuangan dan asuransi	29,21	+	4,99	+
L	Real Estat	16,36	+	2,46	+
MN	Jasa Perusahaan,	11,06	+	1,66	+
O	Administrasi Pemerintahan, Petahanan dan Jaminan Sosial	10,97	+	1,56	+
P	Jasa Pendidikanl	18,45	+	2,64	+
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,49	+	3,60	+
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,37	+	1,78	+

Sumber data diolah dari lampiran

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR positif (+) dan nilai RPS positif (+) yaitu sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan, kontruksi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, Real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social serta jasa lainnya. Hal ini mengartikan bahwa pada periode tahun 2017-2021 , sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten Lombok Tengah

- b. Sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR negatif (-) dan nilai RPS positif (+) yaitu sektor pertambangan dan peggalian. Halini mengartikan bahwa pada periode tahun 2017-2021 sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat kabupaten namun tidak menonjol pada tingkat provinsi.

3. Model Ratio Pertumbuhan Kabupaten Lombok Timur

Adapun hasil perhitungan MRP kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Model Ratio Pertumbuhan Kabupaten Lombok Timur

No	Lapangan Usaha		RPR	RPS	
----	----------------	--	-----	-----	--

		Rill	Nominal	Rill	Nominal
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,23	+	0,76	-
B	Pertambangan dan Penggalian	-44,35	-	2,09	+
C	Industri Pengolahan	24,76	+	0,47	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29,04	+	2,23	+
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	9,66	+	0,65	-
F	Konstruksi	14,75	+	1,64	+
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,06	+	1,29	+
H	Transportasi dan Pergudangan	-15,8		-2,56	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-21,21	-	0,59	-
J	Informasi dan Komunikasi	30,71	+	2,56	+
K	Jasa Keuangan dan asuransi	29,21	+	2,18	+
L	Real Estat	16,36	+	1,38	+
MN	Jasa Perusahaan,	11,06	+	0,94	
O	Administrasi Pemerintahan, Petahanan dan Jaminan Sosial	10,97	+	0,82	-
P	Jasa Pendidikan	18,45	+	1,45	+
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,49	+	1,91	+
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,37	+	0,94	-

Sumber data diolah

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui:

- a. Sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR positif (+) dan nilai RPS positif (+) yaitu sektor pe, Industri pengolahan, Pengadaan listrik dan gas, kontruksi, perdangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, Real estat, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social, Hal ini mengartikan bahwa pada periode tahun 2017-2021 kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten

Lombok Barat.

- b. Sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR negatif (-) dan nilai RPS positif (+) yaitu pertambangan dan penggalian .Hal ini mengartikan bahwa pada periode tahun 2017-2021 sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat kabupaten namun tidak menonjol pada tingkat provinsi.

4. Model Ratio Pertumbuhan Kabupaten Lombok Utara

Adapun hasil perhitungan MRP Kabupaten Lombok Utara dilihatkan pada tabel ini:

Tabel 5. Model Ratio Pertumbuhan Kabupaten Lombok Utara

No	Lapangan Usaha	RPR		RPS	
		Rill	Nominal	Rill	Nominal
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,23	+	1,88	+
B	Pertambangan dan Penggalian	-44,35	-	1,68	+
C	Industri Pengolahan	24,76	+	5,95	+
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29,04	+	6,24	+
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	9,66	+	0,54	-
F	Konstruksi	14,75	+	2,34	+

No	Lapangan Usaha	RPR		RPS	
		Rill	Nominal	Rill	Nominal
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,06	+	1,52	+
H	Transportasi dan Pergudangan	-15,8		-3,41	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-21,21	-	-10,55	-
J	Informasi dan Komunikasi	30,71	+	4,88	+
K	Jasa Keuangan dan asuransi	29,21	+	2,09	+
L	Real Estat	16,36	+	0,71	
MN	Jasa Perusahaan,	11,06	+	3,14	+
O	Administrasi Pemerintahan, Petahanan dan Jaminan Sosial	10,97	+	2,19	+
P	Jasa Pendidikan	18,45	+	3,24	+
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,49	+	3,89	+
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,37	+	0,61	

Sumber data diolah

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui:

- a. Sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR positif (+) dan nilai RPS positif (+) yaitu sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan, Industri pengolahan, Pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, Jasa Perusahaan, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social, Hal ini mengartikan bahwa pada periode tahun 2017-2021 kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten Lombok Barat.
- b. Sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR negatif (-) dan nilai RPS positif (+) yaitu pertambangan dan penggalian .Hal ini mengartikan bahwa pada periode tahun 2017-2021 sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat kabupaten namun tidak menonjol pada

tingkat provinsi.

Analisis Overlay

Analisis overlay digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kontribusi (Yusuf Maulana, 1999). Overlay memiliki empat kriteria:

- a. RPs (+) dan $LQ > 1$ membuktikan gairah sektor sangat menonjol baik dari rasio pertumbuhan maupun keunggulan komparatif
- b. RPs (+) dan $LQ < 1$ membuktikan gairah sektor memiliki pertumbuhan yang menonjol namun tidak mempunyai keunggulan komparatif
- c. RPs (-) dan $LQ > 1$ membuktikan gairah sektor memiliki pertumbuhan yang kecil namun mempunyai keunggulan komparatif.
- d. RPs (-) dan $LQ < 1$ membuktikan gairah sektor tidak potensial dari kedua analisis.

Adapun deskripsi ekonomi potensi wilayah ke 4 Kabupate yang ada di Pulau Lombok adalah terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Deskripsi Ekonomi Potensi Wilayah ke 4 Kabupaten di Lombok Tahun 2017 sampai tahun 2021

No	Sektor Ekonomi	Kabupaten Lombok Barat			Kabupaeten Lombok Tengah			Kabupupaten Lombok Timur			Kabupaten Lombok Utara		
		RPs	LQ	T	RPs	LQ	T	RPs	LQ	T	RPS	LQ	T
1	A	+	-	+/-	+	+	++	-	+	-+	+	+	++
2	B	+	-	+/-	+	-	+/-	+	-	+/-	+	-	+/-
3	C	+	+	++	-	+	-+	-	+	-+	+	-	+/-
4	D	+	+	++	+	-	+/-	+	-	+/-	+	+	++
5	E	+	+	++	-	+	-+	-	-	--	-	+	-+
6	F	+	+	++	+	+	++	+	+	++	+	-	-+
7	G	+	+	+/-	+	-	+/-	+	+	++	+	-	+/-
8	H	+	+	++	-	+	-+	-	-	--	-	-	--
9	I	-	+		-	-	--	-	-	--	-	+	-+
10	J	+	+	++	+	-	+/-	+	-	+/-	+	-	+/-
11	K	+	+	++	+	-	+/-	+	-	+/-	+	-	+/-
12	L	+	+	++	+	+	++	+	+	++	-	+	-+
13	M,N	-	-	--	+	-	+/-	-	-	--	+	-	+/-
14	O	-	+	-+	+	-	+/-	-	+	-+	+	+	++
15	P	+	+	++	+	-	+/-	+	+	++	+	+	++
16	Q	+	+	++	+	+	++	+	+	++	+	-	+/-
17	R,S,T,U	-	+	-+	+	+	++	-	-	--	-	-	--

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan : RPs = Rasio pertumbuhan wilayah studi
LQ = Location quotient; T = Total

Berdasarkan analisis deskripsi struktur ekonomi di atas dapat diketahui sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan baik dari segi kontribusi dan pertumbuhan dalam pembentukan PDRB dan sektor-sektor tersebut dapat menjadi pilihan prioritas dalam pembangunan daerah masing masing Kabupaten di Pulau Lombok. Adapun sektor sektor ekonomi yang dapat menjadi pilihan perioritas pada pembangun untuk setiap Kabupaten adalah:

1. Kabupaten Lombok Barat yang dapat dijadikan alternatif pilihan prioritas dalam pembangunan daerahnya adalah sektor :
 - 1) Industri Pengolahan
 - 2) Pengadaan listrik dan gas,
 - 3) Kontruksi
 - 4) Transportasi dan pergudangan
 - 5) Informasi dan komunikasi
 - 6) Jasa keuangan dan asuransi
 - 7) Real Estate
 - 8) Jasa pendikan
 - 9) Jasa Kesehatan dan kegiatan social.
2. Kabupaten Lombok Tengah yang

dapat dijadikan alternative pilihan prioritas dalam pembangunan daerahnya adalah sektor :

- 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan
- 2) Kontruksi
- 3) Real Estate
- 4) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial
- 5) Jasa kesehatan dan kegiatan social
- 6) Jasa lainnya.
2. Kabupaten Lombok Timur yang dapat dijadikan pilihan prioritas dalam pembangunan daerah adalah sektor :
 - 1) Kontruksi,
 - 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
 - 3) Real estate
 - 4) Jasa pendidikan
 - 5) Jasa kesehatan dan kegiatan social
3. Kabupaten Lombok Utara yang dapat dijadikan alternative pilihan proritias dalam pembangunan daerah adalah sektor :
 - 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan
 - 2) Pengadaan listrik dan gas

- 3) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social
- 4) Jasa pendidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Untuk sektor ekonomi alternatif yang dapat diprioritaskan dalam pembangunan daerah untuk : Kabupaten Lombok Barat yang dapat alternatif pilihan prioritas dalam pembangunan daerahnya adalah sektor : Industri Pengolahan, Pengadaan listrik dan gas, Kontruksi, Transportasi dan pergudangan, Informasi dan komunikasi, Jasa keuangan dan asuransi, Real Estate, Jasa pendidikan, Jasa Kesehatan dan kegiatan social, Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dijadikan alternatif pilihan prioritas dalam pembangunan daerahnya adalah sektor : Pertanian, kehutanan dan perikanan, Kontruksi, Real Estate, Jasa kesehatan dan kegiatan social, Jasa lainnya . Kabupaten Lombok Timur yang dapat dijadikan alternatif pilihan prioritas dalam pembangunan daerah adalah sektor: Kontruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Real estate, Jasa pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan social. Kabupaten Lombok Utara yang dapat dijadikan alternatif pilihan prioritas dalam pembangunan daerah adalah sektor: Pertanian, kehutanan dan perikanan, Pengadaan listrik dan gas, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social, Jasa pendidikan.

Saran

Dalam pembangunan daerah, setiap Kabupaten di Pulau Lombok hendaknya memberi prioritas pada sektor ekonomi yang unggul dari segi kontribusi dan unggul dari

segi pertumbuhan terhadap pembentukan PDRB yang ditandai dengan nilai SLQ positif (+) dan dari segi pertumbuhan nilai RPS positif (+) karena mempunyai daya saing yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan ekonomi Daerah BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, 2020. Nusata Tenggara Barat Dalam Angka
- Yusuf, Maulana, 1999. Ekonomi dan Keuangan Indonesia (EKI) Volume XL VII No 2
- , 2012 Ilmu Ekonomi Regional. Medan : Perdana Mulia Sarana/
- Sudirwo, Daeng. 1981. Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Badung, Penerbit Angkasa Bandung, Mandar Maju, Bandung
- Syafrizal, 2008. Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi, Baduouse Media Padang
- Nasir, M. 2011. Metode Penelitian. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Jingan, M. I, 1993. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan , Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer Era Otomi Daerah. Yogyakarta.